

**Kemampuan Rasio Keuangan dalam Memprediksi Status *Financial Distress*
Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat Periode 2012-
2016**

ARTIKEL

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang



Oleh

RIDA DAMAI YANTI

16043157/2016

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2018**

**KEMAMPUAN RASIO KEUANGAN DALAM MEMPREDIKSI STATUS
FINANCIAL DISTRESS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAN KOTA DI
PROVINSI SUMATERA BARAT PERIODE 2012-2016**

RIDA DAMAI YANTI

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus Air Tawar Padang
Email : ridadamaiyanti97@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai kemampuan rasio keuangan dalam memprediksi status *financial distress* pemerintah daerah di Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota di Sumatera Barat tahun 2012 – 2016 yang diperoleh dari BPK Perwakilan Sumatera Barat. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *financial distress* dan variabel independennya adalah rasio keuangan. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa rasio keuangan mampu memprediksi status *financial distress*. Nilai *short-term solvency ratio*, *long-term solvency ratio* dan *financial flexibility ratio* tidak berpengaruh signifikan terhadap *financial distress*, sedangkan nilai *budgetary solvency ratio* dan *financial independence ratio* berpengaruh signifikan terhadap *financial distress* pemerintah daerah kabupaten dan kota di Sumatera Barat.

Kata Kunci : Keuangan Daerah, *Financial Distress* dan Rasio Keuangan

ABSTRACT

This research aimed to get empirical evidence about the ability of financial ratios to predict financial distress of local government in West Sumatra. This research uses secondary data, they are financial statements of regencies/municipalities of local government in West Sumatra during 2012 – 2016. Financial statements were obtained from the branch of BPK in West Sumatra. The dependent variable in this research is financial distress and the independent variable is a financial ratios. The result showed that the financial ratios capable to predicting financial distress. The value of short-term solvency ratio, long term solvency ratio and financial flexibility ratio haven't significant effect on financial distress, while the value of budgetary solvency ratio and financial independence ratio have significant effect on financial distress of local government in West Sumatra.

Keywords : Local Government Finance, *Financial Distress* and Financial Ratios

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah merupakan lembaga yang memiliki tugas untuk mengatur roda pemerintahan di daerah, pembangunan daerah dan memberikan pelayanan kepada masyarakat luas. Suatu daerah dapat maju dan berkembang apabila mampu menciptakan roda pemerintahan yang transparan, akuntabilitasnya tinggi dan penerapan *value for money* yang benar. Sebagai organisasi yang tidak berorientasi keuntungan, pemerintah daerah memiliki tujuan utama yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan tersebut berupa: pendidikan, kesehatan masyarakat, keamanan, penegak hukum, transportasi publik, infrastruktur dan penyediaan barang kebutuhan publik.

Sutaryo (2010) menyebutkan bahwa penyerahan wewenang pengelolaan keuangan daerah dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah menyebabkan adanya tuntutan pertanggungjawaban dari berbagai pihak, terutama pemerintah pusat. Ia juga menambahkan bahwa penyerahan wewenang ini juga akan menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Selain itu, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengontrol terlaksananya anggaran daerah dibawah pengawasan pemerintah pusat.

Beberapa penelitian telah menggunakan rasio keuangan dalam memprediksi kondisi keuangan pemerintah daerah di Indonesia, yakni *financial distress*. Beberapa penelitian tersebut adalah penelitian yang dilakukan oleh Sutaryo (2010) yang menemukan bahwa *Return On Asset (ROA)*, *Position Government Wealth (Posgw)*, *Current Liquidity Government Wealth (CLgw)*, dan *Long Term Debt to total Asset (LTDA) ratio* berpengaruh signifikan terhadap *financial distress*. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Atmaja (2012) yang menemukan bahwa rasio posisi keuangan dan rasio efisiensi berpengaruh negatif terhadap *financial distress*, sedangkan

rasio hutang berpengaruh positif. Dari hasil-hasil penelitian tersebut dapat diindikasikan bahwa rasio keuangan dapat digunakan untuk memprediksi kondisi keuangan pemerintah daerah, yakni *financial distress* pada waktu yang akan datang.

Ritongga *et al.* (2012) menggunakan lima dimensi rasio keuangan untuk menilai kondisi keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Lima dimensi rasio yang digunakan oleh Ritongga *et al.* (2012) terdiri dari *short-term solvency*, *long term solvency*, *budgetary solvency*, *financial flexibility* dan *financial independence ratio*. Dimensi rasio tersebut telah dirancang sesuai dengan model laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia, namun rasio-rasio tersebut belum diuji secara empiris kesesuaiannya terhadap prediksi *financial distress*.

Financial distress pada sektor pemerintahan adalah ketidakmampuan pemerintah untuk menyediakan pelayanan pada publik sesuai standar mutu pelayanan yang telah ditetapkan (Jones dan Walker, 2007) dalam Sutaryo, dkk (2012). Ketidakmampuan pemerintah ini karena pemerintah tidak mempunyai ketersediaan dana untuk diinvestasikan pada infrastruktur yang digunakan dalam penyediaan pelayanan pada publik tersebut. Akibat dari *financial distress* yaitu berdampak pada kesejahteraan masyarakat yang tidak dapat menikmati fasilitas yang semestinya didapatkan.

Pada pemerintah daerah di Indonesia, ketidakmampuan pemerintah daerah dalam menyediakan infrastruktur disebabkan oleh minimnya jumlah belanja modal yang dikeluarkan, pembelanjaan daerah lebih banyak digunakan untuk belanja pegawai. Hal ini terlihat dari deskripsi dan analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI) yang menyebutkan bahwa rata-rata rasio belanja pegawai secara agregat

provinsi, kabupaten, dan kota adalah 42,78% sedangkan untuk belanja modal masih 24,81% dari total belanja daerah.

Laporan evaluasi belanja modal yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan pada tahun 2013, menyatakan bahwa pemerintah daerah masih mengalami penyerapan belanja modal yang rendah. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah masih belum efektif dan efisien dalam mengoptimalkan belanja daerah khususnya belanja modal yang memiliki peranan penting dalam pelayanan publik.

Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan pelayanan publik yang hasilnya dapat digunakan langsung oleh masyarakat, seperti: belanja modal jalan dan jembatan, belanja modal bangunan dan gedung untuk kegiatan kemasyarakatan, belanja modal alat-alat kedokteran, alat angkutan, belanja modal alat keamanan, belanja modal hewan ternak (Ardhini, 2011).

Penelitian ini mengacu pada penelitian Sutaryo, dkk (2012) yang meneliti tentang prediksi *financial distress* pemerintah daerah di Indonesia, dalam penelitiannya *financial distress* tersebut didefinisikan sebagai ketidakmampuan pemerintah daerah dalam mengembalikan baik pokok maupun bunga pinjaman. Kemampuan yang dimaksud dapat diindikasikan dengan *debt service coverage ratio* (DSCR).

Sementara dalam penelitian ini prediksi *financial distress* didefinisikan sebagai ketidakmampuan pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan publik (Syurmita, 2014) dan indikator pengukuran yang digunakan adalah Belanja Modal, karena menurut Direktorat Jenderal Otonomi Daerah - Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, pemerintah daerah kabupaten dan kota yang ada di provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu dari beberapa pemerintah daerah yang memiliki potensi untuk mengalami *financial distress*, salah

satunya pemerintah daerah Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam pada tahun 2012 yang rasio belanja modalnya sangat rendah yakni 11% untuk Kota Bukittinggi dan 10% untuk Kabupaten Agam, terkait dengan rasio belanja modal yang sangat rendah, maka pemerintah daerah tersebut dinyatakan berpotensi untuk mengalami *financial distress* karena ketidakmampuan pemerintah daerah untuk menyediakan pelayanan publik yang baik.

Hal ini juga terlihat dari hasil analisa pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat yang dikeluarkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) tahun 2016, yang menyatakan bahwa porsi belanja modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Sumatera Barat tahun 2015 ternyata relatif kecil, yakni hanya 22,56% dari total belanja daerah.

Menurut Syurmita (2014) apabila nilai dari rasio belanja modal terhadap total belanja dibawah 30% maka dapat dinyatakan bahwa pemerintah daerah tersebut dalam status *financial distress*, hal ini dianggap relevan dengan peraturan yang berlaku (Peraturan Presiden No. 5/2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 dan Peraturan Presiden No. 2/2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris mengenai kemampuan rasio keuangan berupa *short term solvency ratio*, *long term solvency ratio*, *budgetary solvency ratio*, *financial flexibility ratio* dan *financial independence ratio* dalam memprediksi status *financial distress* pada pemerintah daerah kabupaten dan kota di Sumatera Barat.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “**Kemampuan Rasio Keuangan dalam Memprediksi Status *Financial Distress* Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat Periode 2012-2016**”.

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Financial Distress

Pada sektor pemerintahan, *financial distress* adalah ketidakmampuan pemerintah untuk menyediakan pelayanan publik sesuai standar mutu pelayanan yang ditetapkan. Salah satu standar mutu pelayanan ditetapkan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah adalah alokasi belanja modal. Menurut Jones dan Walker (2007), *financial distress* merupakan ketidakmampuan pemerintah untuk menyediakan pelayanan pada publik sesuai standar mutu pelayanan yang telah ditetapkan. Ketidakmampuan pemerintah ini karena pemerintah tidak mempunyai ketersediaan dana untuk diinvestasikan pada infrastruktur yang digunakan dalam penyediaan pelayanan pada publik tersebut.

Belanja Modal

Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 58/2005 pasal 26 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Financial distress pemerintah daerah dalam penelitian ini didefinisikan sebagai ketidakmampuan pemerintah untuk menyediakan pelayanan pada publik sesuai standar mutu pelayanan yang telah ditetapkan. Kemampuan yang dimaksud dapat diindikasikan dengan belanja modal sebagaimana dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, bahwa porsi belanja modal yang ditetapkan adalah sebesar 30%.

Bagi pemerintah daerah yang tidak mampu mencapai tingkat belanja modal tersebut dapat dinyatakan dalam status *financial distress*, karena seharusnya belanja modal dapat dioptimalkan guna menyediakan pelayanan publik yang maksimal. Dibandingkan belanja modal, banyak di beberapa daerah yang lebih menghabiskan anggarannya untuk belanja pegawai bahkan bisa mencapai 70% dari total belanja daerah.

Rasio Keuangan

Rasio keuangan merupakan alat analisis keuangan yang paling populer dan banyak digunakan. Subramanyam dan Wild (2013) mengatakan bahwa rasio dapat mengungkapkan hubungan penting dan menjadi dasar perbandingan dalam menemukan kondisi dan tren yang sulit untuk dideteksi dengan mempelajari masing-masing komponen yang membentuk rasio.

Short Term Solvency Ratio

Short-term solvency ratio atau biasa disebut dengan rasio likuiditas sebagai rasio yang menunjukkan hubungan antara kas dan aset lancar perusahaan lainnya dengan kewajiban lancarnya. Dalam lingkungan pemerintahan hal ini berarti rasio likuiditas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya.

Ritonga *et al.* (2012) menyebutkan bahwa semakin tinggi nilai dari rasio ini maka semakin tinggi tingkat likuiditas suatu pemerintah daerah. Oleh sebab itu, semakin tinggi nilai dari rasio *short-term solvency* maka, semakin kecil kemungkinan suatu pemerintah daerah mengalami *financial distress*. Berdasarkan pernyataan tersebut peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₁: *Short Term Solvency Ratio* berpengaruh signifikan negatif terhadap *financial distress*

Long Term Solvency Ratio

Rasio ini menunjukkan bagian mana dari total aset pemerintah daerah yang dibiayai dengan sumber daya sendiri. Semakin tinggi nilai dari rasio ini maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai total asetnya dengan sumber daya sendiri untuk jangka panjang. Potensi aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah, apabila dikelola dengan baik maka akan memberi nilai tambah terhadap peningkatan kualitas layanan publik, karena pemerintah daerah mampu untuk membiayai asetnya untuk jangka panjang menggunakan dana dari hasil aktifitas operasi sendiri (bukan pinjaman), artinya pembiayaan pembangunan sebagian besar ditanggung oleh kemampuan sendiri. Berdasarkan pernyataan tersebut peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₂: Long Term Solvency Ratio berpengaruh signifikan negatif terhadap financial distress

Budgetary Solvency Ratio

Ritonga *et al.* (2012) mengatakan bahwa rasio ini digunakan untuk mengukur perbandingan antara total pendapatan yang ada dengan total belanja yang harus dikeluarkan. Semakin tinggi nilai dari rasio ini maka semakin baik kemampuan pendapatan pemerintah daerah dalam membiayai belanja daerahnya, termasuk belanja daerah yang nantinya akan mendatangkan manfaat jangka panjang yang bisa dirasakan oleh masyarakat luas. Sehingga semakin tinggi nilai dari dimensi *budgetary solvency ratio* ini maka semakin rendah kemungkinan terjadinya *financial distress* pemerintah daerah. Berdasarkan pernyataan tersebut peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₃: Budgetary Solvency Ratio berpengaruh signifikan negatif terhadap financial distress

Financial Flexibility Ratio

Rasio yang dapat mengukur kemampuan pemerintah dalam meningkatkan sumber daya keuangannya untuk menanggapi

peningkatan komitmen, baik melalui peningkatan pendapatan atau peningkatan kapasitas utang. Semakin tinggi nilai dari rasio ini, maka semakin tinggi tingkat fleksibilitas keuangan pemerintah daerah tersebut. Hal ini berarti bahwa pemerintah daerah tersebut akan lebih mampu untuk menghadapi peristiwa luar biasa yang bisa datang, baik itu bersumber dari internal maupun eksternal. Salah satu peristiwa luar biasa tersebut adalah terjadinya *financial distress*, sehingga hipotesis yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut :

H₄: Financial Flexibility Ratio berpengaruh signifikan negatif terhadap financial distress

Financial Independence Ratio

CICA (1997) dalam Ritonga *et al.* (2012) mendefinisikan *financial independence ratio* sebagai rasio yang dapat mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk tidak membutuhkan sumber dana, kontrol, atau pengaruh dari luar baik dari sumber nasional maupun internasional. Rasio ini digunakan untuk menggambarkan proporsi pendapatan asli daerah dari keseluruhan total pendapatan, sehingga semakin besar pendapatan asli daerah dari pemerintah daerah maka juga akan berpengaruh pada total pendapatan daerah tersebut. Total pendapatan daerah yang tinggi bisa berdampak pada kualitas pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah, sehingga potensi untuk mengalami *financial distress* juga semakin kecil. Berdasarkan pernyataan tersebut peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₅: Financial Independence Ratio berpengaruh signifikan negatif terhadap financial distress

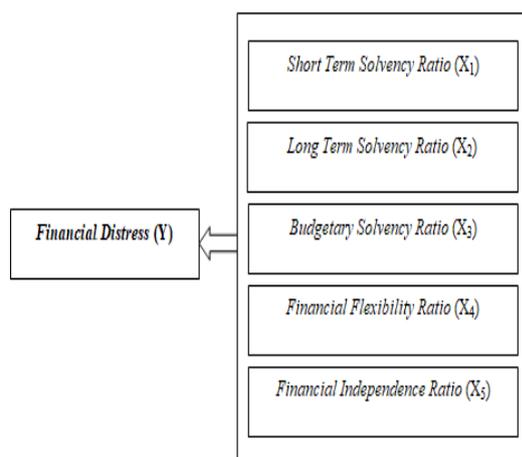
Penelitian Terdahulu

1. Jones and Walker (2007), melakukan penelitian tentang *Local Government Distress* di Australia. Penelitian ini menguji apakah *council characteristic*, *infrastructure* dan *financial variable* berpengaruh terhadap *local service delivery*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *council*

characteristic, infrastructure dan *financial variable* berpengaruh signifikan terhadap *local service delivery*.

2. Sutaryo dan Bambang Sutopo (2010), melakukan penelitian mengenai Nilai Relevan Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan rasio kinerja, rasio posisi keuangan, rasio efisiensi dan rasio hutang untuk memprediksi *financial distress*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rasio kinerja, rasio posisi keuangan dan rasio hutang relevan digunakan untuk melihat prediksi status *financial distress* pemerintah daerah di Indonesia.
3. Syurmita (2014), melakukan penelitian mengenai Prediksi *Financial Distress* Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan rasio kemandirian keuangan, derajat desentralisasi, solvabilitas, populasi penduduk dan umur wilayah untuk memprediksi *financial distress*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemandirian keuangan dan populasi berpengaruh negatif terhadap *financial distress*, derajat desentralisasi berpengaruh positif terhadap *financial distress*, sementara solvabilitas tidak berpengaruh terhadap *financial distress*.

Kerangka Konseptual



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan riset asosiatif. Pardede dan Manurung (2014) mengatakan bahwa riset asosiatif adalah riset yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pardede dan Manurung (2014) mengatakan bahwa pendekatan kuantitatif menggunakan angka sebagai pendekatan penelitiannya. Dalam hal ini variabel yang digunakan antara lain adalah variabel dependen yaitu *financial distress* dan variabel independen yang dikelompokkan menjadi 5 (lima) dimensi yaitu : *short-term solvency ratio, long-term solvency ratio, budgetary solvency ratio, financial flexibility ratio* dan *financial independence ratio*.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat yang berjumlah 19 kabupaten/kota. Mempertimbangkan keterbatasan jumlah populasi, maka teknik pengumpulan sampel yang dilakukan peneliti adalah teknik sensus, yaitu menjadikan seluruh populasi sebagai sampel penelitian. Populasi ini diambil karena populasi berada dalam wilayah tempat peneliti melakukan penelitian, sehingga kemudahan akses data dapat diperoleh.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Sekaran (2009) mengatakan bahwa sumber data sekunder mengacu pada informasi yang dikumpulkan oleh seseorang dan bukan peneliti yang melakukan studi akhir. Data tersebut bisa diperoleh dari internal atau eksternal organisasi dan diakses melalui internet, penelusuran dokumen, atau publikasi informasi. Data dalam penelitian ini berasal dari laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota di Sumatera Barat tahun 2012-2016 yang diperoleh dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik

Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sumatera Barat.

Definisi Operasional

1. Short Term Solvency Ratio

Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancarnya. Kewajiban jangka pendek akan menyerap aset lancar pemerintah daerah yang digunakan untuk membayar kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan.

$$\frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Kewajiban Jangka Pendek}}$$

2. Long Term Solvency Ratio

Rasio ini menunjukkan bagian mana dari total aset pemerintah daerah yang dibiayai dengan sumber daya sendiri. Semakin tinggi nilai dari rasio ini, maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai asetnya untuk jangka panjang.

$$\frac{\text{Total Ekuitas}}{\text{Total Aset}}$$

3. Budgetary Solvency Ratio

Mengukur kemampuan total pendapatan daerah dalam membiayai total belanja daerah. Pemerintah daerah yang memiliki pendapatan daerah yang cukup tinggi akan mampu membiayai belanjanya.

$$\frac{\text{Total Pendapatan}}{\text{Total Belanja}}$$

4. Financial Flexibility Ratio

Mengukur kemampuan pemerintah dalam meningkatkan sumber daya keuangannya untuk menanggapi peningkatan komitmen, baik melalui peningkatan pendapatan atau peningkatan kapasitas utang.

$$\frac{(\text{Total Pendapatan} - \text{Dana Alokasi Khusus})}{\text{Total Kewajiban}}$$

5. Financial Independence Ratio

Rasio yang menggambarkan proporsi pendapatan asli daerah dari total pendapatan daerah. Jika tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) rendah maka ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber dana eksternal akan tinggi. Sebaliknya, jika semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah maka akan

menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat yang ditandai dengan besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

$$\frac{\text{Total Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan}}$$

6. Financial Distress

Status *financial distress* pemerintah daerah yang mana dalam hal ini pemerintah daerah tidak mampu untuk menyediakan pelayanan publik dikarenakan belanja modal yang tidak dialokasikan dengan tepat sehingga berdampak pada kualitas pelayanan yang diberikan pemerintah untuk masyarakat.

$$\text{Rasio BM} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model regresi logistik biner. Menurut Hosmer dan Lemeshow (2000) regresi logistik biner merupakan suatu metode analisis data yang digunakan untuk mencari hubungan antara variabel respon (y) yang bersifat biner atau dikotomi dengan variabel prediktor (x) yang bersifat polikotomi. Keluaran dari variabel respon y terdiri dari 2 kategori yang dinotasikan dengan y = 1 (*non financial distress*) dan y = 0 (*financial distress*). Kategori tersebut didasarkan pada rasio belanja modalnya, jika kurang dari 30% maka termasuk dalam kategori *financial distress* namun jika tercapai 30% maka dikategorikan *non financial distress* (Peraturan Presiden No. 5/2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 dan Peraturan Presiden No. 2/2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019). Model persamaan regresi logistik biner dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ini :

$$\text{Ln} \frac{p}{p-1} = \beta_0 + \beta_1 (\text{STS}) + \beta_2 (\text{LTS}) + \beta_3 (\text{BS}) + \beta_4 (\text{FF}) + \beta_5 (\text{FI})$$

HASIL PENELITIAN

Deskripsi Data

Penelitian ini dilakukan pada pemerintah daerah kabupaten dan kota yang ada di

provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini dilakukan dengan mengolah data laporan keuangan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat untuk periode 2012-2016 terdapat 19 kabupaten dan kota yang ada di provinsi Sumatera Barat.

Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui data yang diteliti dengan melihat dari nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*) dan standar deviasi agar data lebih jelas dan mudah dipahami.

Pembahasan

Berdasarkan analisis data yang diperoleh, koefisien determinasi, nilai *Nagelkerke R Square* adalah 0,277. Hal ini menunjukkan bahwa rasio keuangan mampu menjelaskan pengaruh terhadap *financial distress* dalam model yang digunakan oleh penelitian sebesar 27,7%. Sedangkan 72,3% lainnya dijelaskan oleh faktor luar seperti *good governance*, kondisi wilayah, dan pemekaran wilayah. Dari pengujian parameter regresi logistik dapat diketahui besaran dan arah pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

Short Term Solvency Ratio dan Financial Distress

Hasil pengujian hipotesis pertama ini memiliki nilai signifikan sebesar 0,618 dan koefisien 0,000. Nilai signifikansi yang lebih besar dari 5% menunjukkan bahwa *short-term solvency ratio* tidak berpengaruh signifikan terhadap *financial distress*. Maka penelitian ini gagal mendukung hipotesis pertama dan tidak sejalan dengan penelitian terdahulu dari Sutaryo (2012) yang memperoleh hasil bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi kewajiban jangka pendek dengan aset lancar berpengaruh negatif signifikan terhadap *financial distress*.

Dalam laporan keuangan pemerintah daerah yang dijadikan sampel, terlihat bahwa aset lancar yang dimiliki pemerintah daerah tersebut tidak mampu

untuk menutupi kewajiban jangka pendeknya, seperti utang kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan retensi yang belum dibayarkan pada Dinas Pekerjaan Umum. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jones dan Walker (2008) yang memperoleh hasil bahwa rasio likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap *financial distress* pemerintah lokal di negara bagian Australia.

Long Term Solvency Ratio dan Financial Distress

Hasil pengujian dari hipotesis kedua memiliki nilai signifikansi 0,264 dan koefisien 89,067. Nilai signifikansi yang lebih besar dari 5% menunjukkan bahwa *long-term solvency ratio* tidak berpengaruh signifikan terhadap *financial distress*. Sehingga penelitian ini gagal mendukung hipotesis kedua yang menyatakan bahwa *long term-solvency ratio* berpengaruh negatif signifikan dalam memprediksi *financial distress*. Hal ini terjadi karena kelanjutan atau pembiayaan proyek-proyek tertentu tergantung dari persetujuan parlemen (Harun, 2009).

Potensi aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah, apabila dikelola dengan baik maka akan memberi nilai tambah terhadap peningkatan kualitas layanan publik, namun nyatanya pemerintah daerah belum mampu untuk membiayai asetnya untuk jangka panjang menggunakan dana dari hasil aktifitas operasi sendiri (bukan pinjaman), artinya pembiayaan pembangunan sebagian besar ditanggung oleh kemampuan sendiri. Pemerintah daerah masih merasa takut untuk melanjutkan proyek-proyek yang masih belum terselesaikan, dengan adanya pembiayaan aset untuk jangka panjang menggunakan dana sendiri, maka pengoptimalan sarana dan prasarana pelayanan publik bisa terealisasi dengan baik.

Budgetary Solvency Ratio dan Financial Distress

Hasil pengujian hipotesis ketiga memiliki nilai signifikansi 0,031 dan koefisien

1,768. Nilai signifikansi yang lebih kecil dari 5% menunjukkan bahwa *budgetary solvency ratio* berpengaruh signifikan terhadap *financial distress*. Nilai koefisien positif menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang memiliki kemampuan yang tinggi dalam menghasilkan pendapatan untuk membiayai belanjanya maka akan cenderung mengalami *financial distress*.

Penelitian ini gagal mendukung hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa *budgetary solvency ratio* berpengaruh negatif signifikan terhadap *financial distress*, sebagaimana yang dikatakan oleh Ritonga *et al.* (2012) yang mengatakan bahwa semakin tinggi nilai dari rasio-rasio *budgetary solvency* maka semakin baik kemampuan pendapatan pemerintah untuk menutupi pengeluaran operasionalnya, sehingga pemerintah daerah tersebut dapat terhindar dari *financial distress*.

Financial Flexibility Ratio dan Financial Distress

Hasil pengujian hipotesis keempat memiliki nilai signifikansi 0,127 dan koefisien 0,000. Nilai signifikansi yang lebih besar dari 5% menunjukkan bahwa *financial flexibility ratio* tidak berpengaruh signifikan terhadap *financial distress*, sehingga penelitian ini gagal mendukung hipotesis keempat yang menyatakan bahwa *financial flexibility ratio* berpengaruh negatif signifikan terhadap *financial distress*.

Hal ini dikarenakan *financial flexibility ratio* dalam penelitian ini menyertakan *solvency* atau hutang dalam perhitungannya sehingga tidak relevan untuk sektor publik (Harun, 2009). Indikator tersebut tidak berguna untuk pemerintah daerah karena menurut UU No. 23/2014 Bab XI tentang Pemerintah Daerah, pemerintah pusat akan memberikan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk menutupi kekurangan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Financial Independence Ratio dan Financial Distress

Hasil pengujian dari hipotesis kelima memiliki nilai signifikansi 0,042 dan koefisien -35,073. Nilai signifikansi yang lebih kecil dari 5% menunjukkan bahwa *financial independence ratio* berpengaruh signifikan terhadap *financial distress*.

Nilai koefisien negatif menunjukkan bahwa kemampuan yang tinggi pada pemerintah daerah untuk tidak membutuhkan sumber dana, kontrol, atau pengaruh luar dimana hal tersebut digambarkan melalui proporsi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan yang tinggi akan cenderung terhindar dari *financial distress*. Penelitian ini berhasil mendukung hipotesis kelima yang menyatakan *financial independence ratio* berpengaruh negatif signifikan terhadap *financial distress* serta sesuai dengan teori ketergantungan sumber daya yang dijelaskan oleh Pfeffer dan Salancik (1978).

Menurut Pfeffer dan Salancik (1978) sebuah organisasi dipandang memiliki sifat seperti makhluk hidup (*organisme*) yang kelangsungan hidupnya akan tergantung pada lingkungannya. Organisasi yang mampu menguasai sumber daya vital atau bisa mengurangi ketidakpastian dalam hubungannya dengan organisasi lain akan memiliki kekuatan (*power*) yang paling besar. Kekuatan (*power*) sumber daya keuangan dapat tercermin dari besarnya pendapatan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah tersebut.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data yang telah peneliti lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan :

- a. Nilai *short term solvency ratio* berpengaruh tidak signifikan terhadap *financial distress* pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat dan gagal mendukung hipotesis pertama. Hal ini dikarenakan

- menurut Harun (2009) ukuran hutang tidak relevan untuk sektor publik.
- b. Nilai *long term solvency ratio* tidak berpengaruh signifikan terhadap *financial distress pemerintah* daerah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat sehingga gagal mendukung hipotesis kedua. Hal ini terjadi karena kelanjutan atau pembiayaan proyek-proyek tertentu tergantung dari persetujuan parlemen (Harun, 2009).
 - c. Nilai *budgetary solvency ratio* berpengaruh signifikan terhadap *financial distress pemerintah* daerah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat tetapi koefisiennya bernilai positif sehingga gagal mendukung hipotesis ketiga. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam menutupi pengeluaran operasionalnya belum baik, sehingga pemerintah daerah tersebut tidak dapat terhindar dari *financial distress*.
 - d. Nilai *financial flexibility ratio* tidak berpengaruh signifikan terhadap *financial distress pemerintah* daerah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat sehingga gagal mendukung hipotesis keempat. Hal ini dikarenakan *financial flexibility ratio* dalam penelitian ini menyertakan *solvency* atau hutang dalam perhitungannya.
 - e. Nilai *financial independence ratio* berpengaruh negatif signifikan terhadap *financial distress pemerintah* daerah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat sehingga berhasil mendukung hipotesis kelima, hal ini menunjukkan bahwa kemampuan yang tinggi pada pemerintah daerah untuk tidak membutuhkan sumber dana, kontrol atau pengaruh luar dimana hal tersebut digambarkan melalui proporsi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan yang tinggi akan cenderung terhindar dari *financial distress*.

Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pemerintah daerah yang dijadikan sampel hanya pemerintah daerah yang ada di Sumatera Barat saja, karena hal itu, kemungkinan hasil ini tidak dapat digeneralisasi untuk pemerintah daerah di Indonesia.
- b. Indikator yang dijadikan sebagai faktor penentu variabel dependen hanya terdiri dari satu variabel, yaitu rasio belanja modal terhadap total belanja daerah yang nilainya disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Indikator tersebut menurut peneliti belum menggambarkan keseluruhan pengertian dari *financial distress* pada sektor publik.
- c. Penelitian ini hanya menyertakan indikator keuangan sebagai variabel independen. Sedangkan faktor non keuangannya tidak disertakan.

Saran

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan dalam penelitian ini, maka saran peneliti adalah sebagai berikut :

1. Untuk Pemerintah Pusat
Melakukan upaya yang dapat mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur yang dapat digunakan untuk pelayanan publik.
2. Untuk Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat
Berupaya untuk dapat mengurangi pemborosan belanja pegawai dan mengalokasikannya ke belanja modal. Hal ini dilakukan untuk mendorong pembangunan infrastruktur dalam rangka pelayanan kepada publik yang lebih baik.
3. Untuk Penelitian Berikutnya
 - a. Menggunakan indikator keuangan dan non keuangan sebagai variabel independen. Beberapa contoh indikator non keuangan tersebut adalah *good governance*, kondisi wilayah, jumlah penduduk, pemekaran wilayah dan umur daerah.

- b. Mencari dan menggunakan indikator lain yang dapat menggambarkan kondisi *financial distress* pemerintah daerah secara luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmaja, Khoirul Fariz. 2012. "Analisis Rasio Keuangan untuk Memprediksi Kemungkinan Financial Distress". *Accounting Analysis Journal*. Universitas Negeri Semarang.
- Brigham, Eugene F & Houston, Joel F. 2010. *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Harun. 2009. *Reformasi Akuntansi dan Manajemen Sektor Publik di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hosmer, David W. & Lemeshow, Stanley. 2000. *Applied Logistic Regression*. Canada: John Willey & Sons, Inc.
- Jones, Stewart and R., G., Walker. 2007. Explanators of Local Government Distress. *ABACUS*. 43(3): 396-418.
- Pardede, Ratlan dan Renbard Manurung. 2014. *Path Analysis: Teori dan Aplikasi dalam Riset Bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2010. *Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014*.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2015. *Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019*.
- Platt, H., dan M. B. Platt. 2002. Predicting Financial Distress. *Journal of Financial Service Professionals*. 56: 12-15.
- Ritongga, Irwan Taufiq et al. 2012. "Assessing Financial Condition of Local Government in Indonesia: an Exploration". *Public and Municipal Finance*. Vol. 1: 37-50.
- Sekaran, Uma. 2009. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Subramanyam, K.R. & Wild, John J. 2014. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sutaryo, Bambang, S., dan Doddy, S. 2009. Nilai Relevan Informasi Laporan Keuangan Terkait *Financial Distress* Pemerintah Daerah. Simposium Nasional Akuntansi XIII. Purwokerto, 13-14 Oktober.
- Sutaryo et al. 2012. "Relevansi Informasi Laporan Keuangan Cash Modified Basis: Kemampuan Rasio Keuangan dalam Memprediksi Status Financial Distress Pemerintah Daerah di Indonesia". *Jurnal dan Prosiding SNA-Simposium Nasional Akuntansi*.
- Syurmita. 2014. "Prediksi Financial Distress Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia". *Simposium Nasional Akuntansi XVII*. Lombok, Universitas Mataram.